



Revitalisasi manajemen badan usaha milik desa (BUMDes)

Adrianus Ketmoen*, Salomon Leki, Emiliana Martuti Lawalu, Agnes Susanti Indrawati, Maria Imaculata Pongge, Ferida Agata Kale Lado

Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

*email Koresponden Penulis: adriketmoen@gmail.com

Info Artikel

Riwayat Artikel

Diajukan: 2024-06-04

Diterima: 2024-07-17

Diterbitkan: 2024-07-25



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2024 Penulis

ABSTRAK

Dalam undang-undang desa, pengertian BUMDes adalah badan usaha yang seluruh bagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Revitalisasi adalah upaya untuk mendaur ulang (Recycle) dengan tujuan untuk memvitalkan kembali fungsi utama dengan kata lain mengembalikan pada vitalitas fungsi utamanya yang telah pudar. Tujuan dari terlaksananya kegiatan ini yakni dilakukannya revitalisasi manajemen BUMDes Kotiom Desa Tunoe dikarenakan keadaannya saat ini yang sedang "mati suri" berdasarkan wawancara awal dengan Kepala Desa Tunoe. Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini terlaksana dengan metode ceramah dan pendampingan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah outreach methods sehingga terjadi kontak langsung dengan Masyarakat dalam hal ini manajemen pengelola BUMDes Kutiom. Rencana tindak lanjut kegiatan ini yakni dengan melakukan proses pendampingan dilakukan secara langsung maupun memanfaatkan teknologi system informasi yang tersedia dengan membuat WA Group sehingga manfaat kegiatan bukan hanya bersifat pendampingan, tetapi sampai eksekusi lapangan berupa perubahan manajemen BUMDes, perumusan model usaha, dan pemetaan potensi lokal yang dapat dimanfaatkan. Selain itu, BUMDes Kutiom dan Desa Tunoe dijadikan desa binaan sehingga pendampingan dan pembinaan terjadwal. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan diketahui bahwa terdapat peningkatan pemahaman aparatur desa maupun manajemen pengelola BUMDes tentang fungsi, peran, dan manfaat keberadaan BUMDes. Hasil revitalisasi dirumuskan manajemen pengelola BUMDes yang baru dengan pemahaman dan praktek pemanfaatan potensi lokal desa yang pemanfaatannya menjadi kekuatan bagi perkembangan BUMDes.

Kata Kunci: revitalisasi; manajemen; BUMDes

Cara mensitasi artikel:

Ketmoen, A., Leki, S., Lawalu, E. M., Indrawati, A. S., Pongge, M. I., & Lado, F. A. K. (2024). Revitalisasi manajemen badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(3), 595–606. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i3.22190>

PENDAHULUAN

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya Masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Strukturnya sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang memiliki posisi sangat penting. (Widjaja, 2010). Lahirnya undang-undang



Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa membuat cara pandang Indonesia terhadap pembangunan berubah. Sebelum hadirnya undang-undang tentang desa pembangunan yang berjalan hanya menunggu intruksi dari atas sehingga desa dapat dikatakan sebagai objek penerima kebijakan yang datang dari pusat, provinsi dan kabupaten tanpa memperhatikan aspirasi yang datang dari masyarakat desa itu sendiri. lain halnya dengan pembangunan yang datang atau berasal dari bawah, dimana masyarakat daerah diberikan ruang untuk terlibat dalam perencanaan hingga sampai pelaksanaan, dikarenakan Masyarakat mampu mengidentifikasi sendiri masalah ataupun kebutuhan yang terjadi pada desa mereka sendiri. Dengan lahirnya undang-undang desa membuat setiap desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi serta adat yang lahir di desa tersebut.

Dalam undang-undang desa, pengertian BUMDes adalah badan usaha yang seluruh bagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang terpisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, makna itu tentunya melekat dalam tujuan pemerintah desa, tentunya hal ini merupakan potensi yang dimiliki setiap desa dalam proses perkembangannya.

Dengan demikian, desa perlu melakukan pemberdayaan yang dimulai dengan tahap perencanaan, pelaksanaan kemudian tahap evaluasi. Dengan dilakukannya hal ini merupakan bagian dari proses pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki desa. Menurut Pingkan Aditiawati, dkk (2016) potensi lokal merupakan kekayaan alam, budaya, dan sumber daya manusia yang terdapat dalam sebuah daerah. Keadaan kontur alam dan adat yang berbeda menjadikan ciri khas dari sebuah desa yang merupakan potensi lokal dari setiap wilayah.

Melalui BUMDes masyarakat diharapkan dapat mengelola keuangannya secara mandiri, dengan bantuan pemerintah berupa penyaluran dana desa yang berasal dari alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Murwadjiet al., 2017). BUMDes sebagai lembaga usaha mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa, menjadi sumber PADes, sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih cepat (Dewi, 2014). BUMDes berperan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, mendorong pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat desa, memiliki *multiplier effect* yang luas, mengurangi jumlah penduduk yang tejerat rentenir karena BUMDes mampu memberikan kredit yang murah, serta mampu memberi kontribusi terhadap PADes, sehingga anggaran pembangunan menjadi lebih banyak (Gunawan, 2011). Kontribusi BUMDes terhadap PADes akan signifikan dengan pembangunan apabila masyarakat desa memiliki modal sosial yang kuat, meliputi organisasi desa, kepercayaan masyarakat, norma yang berlaku, dan jaringan yang mampu mendorong kemajuan pembangunan desa (Sidik, 2015).

BUMDes dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal desa dalam mendukung perkembangan ekonomi. Strategi dalam pembangunan ekonomi suatu wilayahnya harus bertumpu pada sumberdaya atau potensi lokal (Elisa & Santoso, 2017). Menurut (Soleh, 2017) Potensi lokal di desa adalah segala

daya, kekuatan dan kemampuan dari berbagai aspek yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam mencapai tujuan pembangunan. Pembangunan ekonomi di tingkat desa tidak dapat dipisahkan dari pembangunan usaha berskala kecil dan menengah (Tambunan, 2009). BUMDes dapat memberikan pinjaman dana untuk modal usaha, dan juga sebagai penampung produk usaha UMKM yang mengalami kesulitan pemasaran (Agunggunanto et al., 2016).

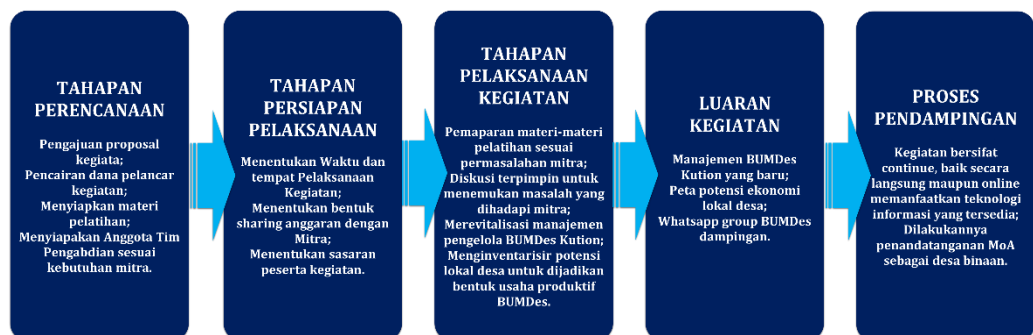
Menurut (Agunggunanto et al., 2016) bahwa faktor keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dianggap suatu menjadi kelemahan proses pengembangan suatu BUMDes. Berangkat dari pendapat tersebut, sehingga penting untuk dilakukan pendampingan kepada manajemen pengelola BUMDes tentang tata Kelola dan cara menggali potensi lokal daerah yang bernilai ekonomis. Berdasarkan hasil kajian (Zulkarnaen, 2016) juga dijelaskan bahwa lembaga seperti BUMDes memang memerlukan pembimbingan ataupun konsultasi dari pihak akademisi, baik dari aspek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terutama dalam pengembangan kemampuan dalam berusaha, peningkatan pengetahuan, keterampilan begitu juga dengan sikap yang akan berefek pada peningkatan pendapatan. Olehnya, dalam menjalankan manajemen BUMDes sangat perlu kesiapan SDM, pengurus sangat dianjurkan untuk memiliki keterampilan untuk menyusun rencana dan pengembangan serta keberlanjutan usaha yang dijalankan (Sudirno, dkk 2020). Karena, dengan adanya BUMDes sebagai usaha milik bersama, secara tak langsung dapat menjadi penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian desa (Ridzal & Hasan, 2020).

BUMDes Kutiom Desa Tunoe telah didirikan sejak tahun 2018 dan sempat berproses menjalankan beberapa jenis usaha dalam mendukung peningkatan pendapat desa hingga tahun 2020. Penanaman modal desa dalam BUMDes yang cukup signifikan dari aspek jumlah tidak mampu dikelola dengan baik oleh manajemen dengan alasan tidak tau uang sebanyak itu harus diapakan, dan atas dasar ketakutan akan mengelola uang negara yang imbasnya pada pemeriksaan, manajemen BUMDes Tunoe berhenti menjalankan usahanya. Adapun beberapa usaha produktif yang pernah digagas manajemen BUMDes Kutiom adalah usaha simpan pinjam, menampung hasil bumi Masyarakat, dan toko sembako, namun semua usaha itu tidak berlangsung lama karena faktor utama di atas, juga terjadi multi tafsir peran dan fungsi masing-masing struktur organisasi dalam manajemen BUMDes Kutiom. Mengetahui permasalahan di atas berdasarkan komonikasi awal dengan Kepala Desa Tunoe, maka tim pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Ekonomi Pembangunan melakukan kegiatan pendampingan untuk merevitalisasi manajemen BUMDes Kutiom, serta melakukan pemetaan potensi lokal desa yang dapat dijadikan bentuk usaha BUMdes dengan judul "Revitalisasi Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kutiom Desa Tunoe, Kecamatan Miomafo Timur-Kabupaten Timor Tengah Utara Berbasis Potensi Lokal".

METODE

Pada pelaksanaan suatu kegiatan, maka penting adanya metode yang digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, adapun metode yang digunakan adalah outreach methods. Menurut (Zubaedi, 2013), metode ini (*outreach methods*) merupakan kegiatan yang sifatnya melakukan kontak, baik dalam bentuk pelayanan serta pendampingan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelbagai kegiatan yang berorientasi untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Metode secara teoritis menurut (Isnaini & Herlina, 2020) dijelaskan bahwa suatu cara-cara utama yang dapat digunakan dalam mencapai suatu tujuan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, adapun langkah-langkah yang dilakukan, diantaranya a) tahapan perencanaan, b) mendiskusikan program dengan mitra, c) menyiapkan materi sosialisasi, d) pelaksanaan sosialisasi tentang BUMKam (Pembentukan, Pengelolaan, Pengembangan dan Sumber Dana), e) pemetaan potensi lokal, dan f) melakukan evaluasi. Flowchat yang dilalui dalam Upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi BUMDes Kutiom Desa Tunoe dapat digambarkan sebagai berikut.

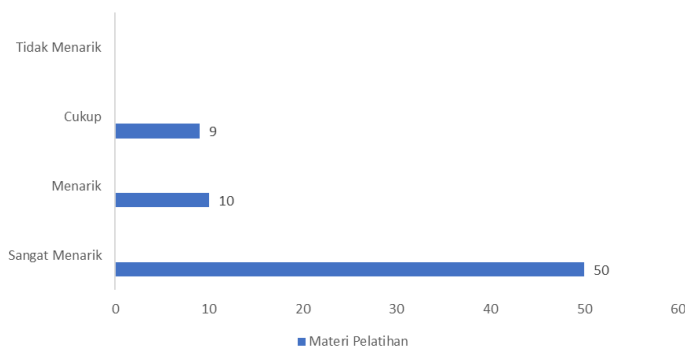


Gambar 1. Tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat

Terlaksananya kegiatan ini nantinya akan lancar serta tercapai maksud dan tujuannya berkat peran penting dari mitra dari kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini yakni pemerintah Desa Tunoe. Pemerintah desa berperan dalam menugaskan manajemen pengelola BUMDes untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini, menyediakan sarana prasarana serta alat dan bahan yang digunakan dalam kelancaran proses kegiatan ini. Evaluasi yang berkelanjutan akan terlaksana melalui media WA Group dan media sosial lain sehingga proses pembimbingan tidak terputus saat pelatihan saja. Ketua tim berperan dalam mengkoordinasikan semua proses dan mendistribusikan tugas pengabdiann. Anggota tim dan mahasiswa bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan. Mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian ini merupakan mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan.

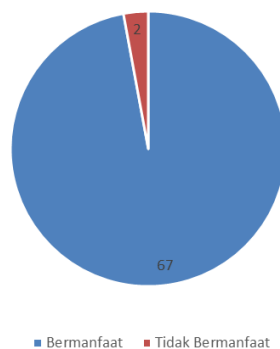
HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa hasil yang diperoleh dari kegiatan Revitalisasi Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kutiom Desa Tunoe, Kecamatan Miomafo Timur-Kabupaten Timor Tengah Utara Berbasis Potensi Lokal adalah terbentuknya manajemen pengelola BUMDes Kutiom yang baru dengan pemahaman dasar akan pengelolaan BUMDes; teridentifikasinya potensi-potensi lokal desa yang dapat dijadikan bentuk usaha produktif desa; peningkatan pemahaman akan penataan keuangan BUMDes; Advokasi penyertaan modal BUMDes; dan merancang nilai tambah produk BUMDes. Berdasarkan hasil analisis respon balik dari peserta kegiatan dengan mengisi kuisioner untuk menilai kepuasan mereka terhadap materi pelatihan, dan manfaat yang diperoleh terlihat dalam grafik berikut.



Gambar 2. Grafik pemanfaatan materi pelatihan

Berdasarkan grafik di bawah ini, menunjukkan bahwa mayoritas peserta menyebutkan bahwa materi pelatihan sangat menarik bagi mereka.



Gambar 3. Grafik kebermanfaatan kegiatan

Permasalahan prioritas yang dialami oleh manajemen BUMDes Kutiom Desa Tunoe, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten TTU dapat diuraikan dalam hasil dan pembahasan berikut.

Ketidak siapan sumber daya manusia sebagai manajemen BUMDes dalam mengelola anggaran penyertaan modal dari pemerintah desa

Dalam UU Desa tercantum kewajiban desa dalam menyediakan penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam jumlah yang cukup signifikan. Selama tiga tahun terakhir terhitung tahun 2021-2023, pemerintah Desa Tunoe mengalokasikan penyertaan modal kepada BUMDes Kutiom sebagai mana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. *Penyertaan modal BUMDes Kutiom dari Pemerintah Desa Tunoe*

No	Tahun	Jumlah (Rp.)
1	2018	150.000.000,-
2	2019	70.000.000,-
3	2020	50.000.000,-
JUMLAH		270.000.000,-

Sumber: Desa Tunoe, 2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penyertaan modal Pemerintah Desa Tunoe kepada BUMDes Kutiom cenderung menurun tiap tahun anggaran terhitung tahun 2021-2023. Penyertaan modal terbesar terjadi pada tahun 2018 awal berdirinya BUMDes Kutiom dengan jumlah Rp.150.000.000,- terus menurun hingga menjadi Rp.50.000.000,- per tahun 2020. Penyertaan modal dari desa terhadap BUMDes hanya terjadi pertiga tahun di atas, selanjutnya BUMDes tidak beroperasi sehingga tidak ada lagi penyertaan modal desa. Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan aparatur desa diketahui bahwa penyebab menurunnya penyertaan modal terhadap BUMDes karena pengelola BUMDes tidak mampu mengelola anggaran yang diberikan sehingga mengakibatkan pembengkakan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). SILPA yang besar pada APBDes menjadi beban dan dapat diartikan sebagai kegagalan dalam mengelola anggaran.

Faktor utama kenyataan di atas setelah ditelusuri lebih jauh, ditemukan bahwa manajemen pengelola BUMDes tidak mempunyai kesiapan dalam menyelenggara anggaran yang cukup besar. Terdapat kebingungan dan ketakutan dari manajemen pengelola BUMDes untuk menggunakan anggaran penyertaan modal dari desa. Manajemen pengelola BUMDes Kutiom berjumlah 10 orang dengan jenjang Pendidikan berkisar Sekolah Menengah Atas hingga Sarjana, yang secara kemampuan dianggap bisa untuk menjalankan BUMDes, sosialisasi dan pelatihan menjadi Solusi kongkrit terbaik yang tim pengabdian ini lakukan mengingat “mati suri” nya BUMDes Kutiom difaktor utamakan oleh ketidak siapan manajemen pengelola BUMDes.

Pembukaan kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, dihadiri oleh Kepala Desa Tunoe, aparat desa, manajemen BUMDes Kutiom yang lama, serta tokoh Masyarakat (gambar 4).



Gambar 4. Pembukaan kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan BUMDes

Kekawatiran akan tuntutan pemeriksaan oleh badan pemeriksa keuangan akan penggunaan anggaran negara

Nomenklatur Keuangan Desa baik yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah dalam bentuk Anggaran Dana Desa, maupun yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara berupa Dana Desa, dalam pelaksanaannya terdapat tahapan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Lembaga negara yang dipercayakan, dari jenjang kabupaten/ kota hingga jenjang pusat/ nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lembaga-lembaga pemeriksa keuangan tentunya berjalan sesuai petunjuk teknis yang ada. Lembaga pemeriksa keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Dengan demikian memiliki peran untuk memastikan pengelolaan keuangan negara tersebut dapat terwujud yaitu mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dengan pengetahuan dan kemampuan yang tergolong terbatas, manajemen BUMDes Kutim enggan untuk melakukan proses usaha dengan bayangan ketakutan akan tuntutan pemeriksaan laporan keuangan yang sebenarnya akan berjalan baik jika dilakukan dan dipertanggungjawabkan secara baik pula.

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen BUMDes Kutim yang telah lama non aktif, ditemukan fakta di atas. Melihat kenyataan ini, tim pengabdian kepada Masyarakat unwira membekali manajemen BUMDes yang baru direvitalisasi dengan pengetahuan akan tugas dan fungsi Lembaga pemeriksa keuangan secara berjenjang baik dari Tingkat kabupaten/ kota hingga pusat. Selain itu, tim pengabdian juga telah berhasil merumuskan beberapa buku saku manajemen pengelolaan BUMDes yang salah satunya adalah tentang pengelolaan keuangan BUMDes yang sederhana namun dapat dipertanggungjawabkan dengan contoh kasus kongkrit yang tim berikan sebagai pegangan bagi manajemen BUMDes Kutim yang baru sehingga tidak ragu dan takut dalam menjalankan usaha-usaha produktif BUMDes yang telah digali Bersama dengan mempertimbangkan potensi lokal desa.

Buku Saku Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan Sembilan Seri, dan seri ke tiga tentang Penataan Keuangan BUMDes yang dilengkapi dengan contoh kongkrit yang sederhana sehingga mudah dipahami untuk dipraktekkan sehingga

ketakutan akan pemeriksaan keuangan bukan menjadi masalah yang menghambat proses produksi BUMDes (gambar 5).



Gambar 5. Buku saku pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)

Multitafsir peran dan fungsi dalam struktur organisasi manajemen BUMDes

Sebuah organisasi dalam pelaksanaan tujuan dan fungsi pendiriannya tentu mempunyai struktur organisasi. Struktur organisasi berdasarkan tujuannya untuk memudahkan karyawan untuk lebih efisien dengan spesialisasi pekerjaan. Inti dari adanya struktur organisasi di dalam perusahaan adalah membagi pekerjaan karyawan untuk mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam pelaksanaannya, manajemen BUMDes Kutim cenderung bekerja sesuai situasi dan kondisi serta bersifat spontan, karena itu banyak pekerjaan yang dilakukan secara berulang serta dilakukan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi dalam struktur organisasi. Manajemen BUMDes belum memahami tugas dan fungsi serta peran masing-masing orang dalam struktur organisasi. Kenyataan ini ditemukan berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen pengelola BUMDes juga aparatur desa yang juga berperan sebagai pengawas.

Menanggapi temuan di atas, tim mencoba memberikan materi tentang peran dan fungsi masing-masing karyawan sesuai dengan struktur organisasi. Terjadi peningkatan pemahaman serta pengetahuan dari manajemen pengelola BUMDes yang terlihat dari respon serta hasil monev tertulis yang dilakukan setelah kegiatan. Selain itu, tim pengabdian juga membekali manajemen pengelola BUMDes dengan buku saku manajemen pengelolaan BUMDes dengan bab khusus struktur organisasi manajemen BUMDes. Proses pendampingan dan pembinaan tentunya tidak berakhir dengan 2 hari kegiatan yang terhitung tanggal 24-24 Mei 2024, pendampingan dan pembinaan terus berlanjut dengan sistem menjadikan Desa Tunoe pada umumnya dan BUMDes Kutim pada khususnya sebagai desa dan lembaga binaan. Konsultasi dan penyampaian apa yang ingin diketahui juga dilakukan dengan memanfaatkan media-media sosial yang tersedia seperti WA Group, Facebook, Instagram serta media sosial lain, mengingat di Desa Tunoe telah terjangkau jaringan telekomunikasi dan internet dengan kualitas dan kecepatan yang baik.

Penyerahan Buku Saku Pengelolaan BUMDes dengan sembilan seri yakni seri 1: Mekanisme pembentukan BUMDes; seri 2: Penataan Administrasi BUMDes;

3: Penataan Keuangan BUMDes; 4: Penyusunan AD/ART BUMDes; 5: Merancang Bussinnes Plan BUMDes; 6: Merancang Nilai Tamba Produk BUMDes; 7: Advokasi Penyertaan Modal BUMDes; 8: Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Promosi BUMDes; dan 9: Pendaftaran Badan Hukum BUMDes secara Online (gambar 6).



Gambar 6. Dokumentasi penyerahan buku saku pengelolaan BUMDes

Kemampuan yang minim akan cara menggali dan memanfaatkan potensi lokal daerah sebagai kekuatan dan peluang berlangsungnya usaha produktif BUMDes

Peningkatan kemampuan dengan menggali potensi lokal masyarakat merupakan hal penting terutama bagi masyarakat desa. Dengan kemampuan dan potensi lokal desa baik fisik maupun non fisik yang ada dapat memberikan peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Mengidentifikasi potensi lokal bisa dilakukan melalui penelitian, pengamatan, dan interaksi dengan masyarakat setempat. Hal ini melibatkan pemetaan sumber daya alam, budaya, keterampilan, dan potensi lain yang ada di desa.

Langkah-langkah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah: (a) Inventarisasi/identifikasi semua potensi yang dimiliki; (b) Tentukan keunggulan yang dimiliki oleh setiap potensi yang dimiliki tersebut; (c) Lihat keterkaitan antara potensi suatu daerah dengan potensi daerah lain/sekitarnya; (d) Susun skala prioritas. Potensi lokal yang dapat dikembangkan antara lain sumber daya alam, pertanian, perikanan, pariwisata, kerajinan tangan, dan industri kreatif. Untuk dapat mengetahui apa potensi desa yang dapat dikembangkan, ada dua langkah yang bisa dilakukan yakni yang pertama adalah melihat langsung potensi sumber daya alam yang ada serta yang kedua adalah melihat bagaimana sumber daya manusia yang ada.

Secara umum potensi-potensi lokal sebagaimana dijelaskan di atas, tersedia secara cukup dan dapat dimanfaatkan sebagai lapangan usaha manajemen BUMDes. Cara menggali dan memanfaatkan potensi-potensi lokal desa menjadi kendala utama tidak beroperasinya BUMDes Kutim. Setelah pelatihan cara menggali dan memanfaatkan potensi lokal desa, manajemen pengelola BUMDes menyadari kalau potensi-potensi itu telah ada sejak lama dan tersedia secara cukup untuk dijadikan obyek usaha. Berdasarkan hasil kerja bersama ini juga telah dirumuskan bentuk-bentuk usaha produktif yang akan dikerjakan oleh

manajemen BUMDes Kutiom yang baru yakni usaha simpan pinjam, usaha penampungan hasil alam, usaha distribusi air bersih, pagelaran seni budaya lokal yang direncanakan menjadi event tahunan, budidaya ikan air tawar, dan budidaya ayam petelur.



Gambar 7. Dikusi dan penemuan serta perumusan Bersama potensi-potensi lokal Desa Tunoe

SIMPULAN

Terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini tentunya membawa dampak positif bagi aparatur Desa Tunoe, manajemen pengelola BUMDes Kutiom, serta Masyarakat desa secara umum. Hal ini terbukti lewat respon balik positif yang didapat dari wawancara langsung maupun isian angket pemahaman yang dibagikan sebelum dan sesudah kegiatan. Mengingat manajemen BUMDes Kutiom baru dan pemahaman yang relatif dasar, maka BUMDes Kutiom Desa Tunoe dijadikan mitra binaam tim pengabdian Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Katolik Widya Mandira dengan tujuan bersamanya adalah membina dan mendampingi BUMDes Kutiom hingga menjadi mapan berdiri sendiri dengan bentuk-bentuk usaha produktif yang tetap dan berlanjut. Bentuk pembinaan dan pendampingan dilakukan secara langsung dengan jadwal satu tahun 2 kali kunjungan langsung, sedangkan jika terdapat hal urgen tersedia Whatsapp Group yang memungkinkan komunikasi dapat berjalan setiap waktu sesuai kebutuhan.

Berdasarkan paparan hasil dan pembahasan di atas, Adapun beberapa temuan dan Solusi kongrit yang tim pengabdian Unwira rumuskan sebagai Kesimpulan artikel ini yakni sumber daya manusia yang adalah manajemen pengelola BUMDes menjadi kunci berhasil tidaknya kegiatan usaha BUMDes, dengan melihat situasi dan kondisi keberadaan BUMDes Kutiom yang telah lama tidak aktif maka perlu adanya revitalisasi manajemen pengelola BUMDes guna memperoleh SDM yang siap bekerja dengan kemampuan dan pemahaman yang baik. Keterbatasan informasi dan pengetahuan akan manajemen pengelolaan BUMDes, regulasi yang mengaturnya serta kemampuan mengidentifikasi potensi lokal desa menjadikan SDM pengelola menjadi bimbang dalam penentuan jenis usaha yang akan dikelola dan bagaimana cara mengelolanya.

Perlu pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada manajemen pengelola BUMDes Kutiom terkait pengelolaan keuangan yang

berbentuk penyertaan modal dari desa. Hal ini menjadi sangat penting mengingat dampak yang besar jika salah menggunakan uang penyertaan modal dari desa, selain itu uang dalam jumlah banyak yang tidak diimbangi dengan kemampuan mengelola membuat manajemen BUMDes Kutiom yang lama menjadi ragu untuk menggunakan uang dimaksud karena telah dahulu terbayang akan resiko yang timbul jika disalahgunakan.

Manajemen BUMDes Kutiom yang telah direvitalisasi dan dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan dasar pengelolaan BUMDes harus mampu menggali dan memanfaatkan potensi lokal desa sebagai kekuatan untuk menjalankan bentuk-bentuk usaha produktif demi keberlanjutan BUMDes. Banyak bentuk potensi lokal desa yang bernilai ekonomis jika dimanfaatkan dengan baik, selain itu dengan jalannya bentuk-bentuk usaha produktif BUMDes secara otomatis akan dapat menghindarkan Masyarakat dari praktek-praktek buruk yang telah terjadi selama ini misalnya koperasi pinjaman harian dengan bunga yang menyulitkan Masyarakat, hasil bumi yang banyak namun tidak ada pengepul yang pasti menyebabkan oknum pemilik modal seenaknya menentukan harga pasar, serta masih banyak lagi kenyataan lain. Perlu dibentuknya badan pengawas eksternal baik dari desa, tokoh masyarakat, maupun akademisi untuk mengontrol jalannya usaha produktif oleh BUMDes.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini tim pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Katolik Widya Mandira mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Tunoe, staf desa dan jajarannya, serta manajemen BUMDes Kutiom yang telah bersedia menjadi Lokasi dan obyek PKM ini, kepada Universitas Katolik Widya Mandira sebagai penyedia anggaran sehingga PKM ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unwira sebagai wadah akses pembiayaan hibah Unwira, kepada tim PKM Program Studi Ekonomi Pembangunan Unwira yang telah bersedia menjadi pementor/mentor dalam kegiatan PKM ini dan kepada semua pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses hingga terselesaikannya kegiatan PKM ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Amar, S. (2017). Perjuangan Gender dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Pada Abad XIX. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 1(2), 106–119. <https://doi.org/10.29408/fhs.v1i2.587>
- Amifudin, A. T., & Anggraini, Y. (2024). Pengaruh Biaya Transportasi, Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Ekspor Non Migas Indonesia Tahun 2017-2022. *INVESTAMA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 17–26. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v10i01.1353>
- Ginting, A. M. (2017). Analisis Pengaruh Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.30908/bilp.v11i1.185>
- Gs, A. D., Dicky, M., Lubis, S., & Mahjudin, M. (2024). *Implementasi Algoritma Beale-*

Powell Restarts untuk Prediksi Perkembangan Ekspor Migas- NonMigas di Indonesia. 8, 271–284.

- Hidayah, U., Mulatsih, S., & Purnamadewi, Y. L. (2020). Optimalisasi Unit Usaha Bumdes Harapan Jaya Berdasarkan Potensi Lokal di Desa Pagelaran. *Jurnal Benefita*, 5(1), 101–112. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4274>
- Nauli, C., Maramis, M. T. B., & Mandeij, D. (2024). Analisis Pengaruh Net Ekspor dan Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Negara Asean Periode 2012-2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efesiensi*, 24(2), 109–120. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/54029>
- Rahmadhana, E. (2023). Analisis Pengaruh Ekspor Dan Impor Migas - Non Migas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015- 2022. *Jurnal Economica*, 11(2), 380–385. <https://doi.org/10.46750/economica.v11i2.207>
- Senjani, Y. P. (2019). Peran Sistem Manajemen Pada Bumdes Dalam the Role of Management System in Bumdes in Increasing The Real Income of The Village. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23–40. <https://doi.org/http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/article/view/23698>
- Wulandari, M. C., & Wicaksono, R. A. (2023). Analisis Determinan Perdagangan Migas Dan Non Migas Terhadap Inflasi Indonesia. *Jurnal GeoEkonomi*, 14(1), 72–83. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v14i1.270>